

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian Candra *and* Hidayatullah (2024) memberikan perbandingan terhadap UMKM yang melakukan penyusunan pencatatan berdasarkan aturan SAK EMKM serta hanya melakukan pencatatan sederhana. Pengusaha yang sudah melakukan penerapan catatan keuangan berdasarkan dengan SAK EMKM dilatar belakangi oleh pemilik usaha yang berprofesi sebagai Dosen Ekonomi. Hal tersebut berpengaruh terhadap laporan keuangan usaha yang dibuat karena adanya pemahaman mengenai proses penyusunan keuangan yang sesuai dengan peraturan. Namun, bagi UMKM yang tidak memiliki tenaga akuntansi akan berdampak pada pemahaman penyusunan laporan. UMKM tersebut hanya mencatat kas masuk serta keluar dan sisa barang persediaan. Hal tersebut membuat kendala dalam mengetahui beberapa informasi. Permasalahan tersebut dapat menjadi sebuah hambatan untuk pengusaha karena tidak adanya transparansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2022) mendapatkan hasil selama proses penyusunan laporan adanya informasi yang jelas dapat dijadikan sebagai panduan. Namun, dengan berkembangnya waktu manfaat dari laporan finansial mengalami perkembangan seperti menjadi pedoman dalam penentuan penilaian atas kinerja perusahaan dalam mencukupi akan kewajiban jangka pendek atau panjang serta menentukan kedudukan laporan finansial di perusahaan.

literasi mengenai sistem pencatatan finansial sesuai dengan aturan. Selain itu, beberapa pemilik juga menganggap pencatatan yang sesuai bukan merupakan sebuah hal penting. Para UMKM hanya mencatat garis besar yang terjadi seperti proses penjualan serta penerimaan kas saja. Namun, pada kenyataannya pembukuan yang baik akan membuat laporan keuangan lebih terstruktur. Selain itu, hal tersebut membantu mengurangi terjadinya resiko keuangan akibat pencatatan yang tidak rinci.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shodiqin *and* Yuliati (2024) memiliki hasil yang hampir sama yaitu karena kurangnya pengetahuan dalam pembuatan laporan finansial. Penelitian yang pada UD Azza Jaya dapat disimpulkan bahwa hambatan yang diperoleh ialah minimnya pengetahuan dalam penyusunan laporan finansial oleh pemilik usaha. Pemilik UD hanya dapat memahami tentang transaksi keluar dan masuk saja, begitu juga para karyawan di Toko yang belum memahami pencatatan laporan keuangan.

Hasil penelitian didapatkan oleh Ruwanti et al. (2022) tentang Implementasi SAK EMKM di Kota Banjarmasin menyatakan bahwa jenjang pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Pemilik UMKM memiliki latar jenjang bukan pendidikan tinggi memiliki pengetahuan pemahaman dalam penerapan sesuai dengan aturan. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tinggi ataupun rendah jenjang Pendidikan tidak berpengaruh pandangan tentang pentingnya laporan finansial. Adanya peraturan yang menjelaskan SAK EMKM membantu para pemilik untuk menerapkan tanpa melihat jenjang pendidikan.

Penelitian yang dilakukan Laksana et al. (2024) memiliki hasil bahwa keterbatasan waktu, sumberdaya serta hambatan yang lain menjadi kurangnya penerapan SAK EMKM. Penelitian pada Toko Sinar Berkah tersebut menjelaskan bahwa pengusaha memahami tentang laporan laba rugi. Namun, kurangnya pemahaman proses pembukuan yang benar membuat belum maksimalnya laporan yang dihasilkan. Pemahaman mengenai penyusunan laporan finansial sesuai SAK EMKM merupakan sebuah hal penting

B. Landasan Teori

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008, pada Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha aktif yang dimiliki perseorangan atau badan usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang beroperasi secara mandiri serta dikelola oleh mandiri atau badan. Usaha tersebut belum termasuk dalam kategori perusahaan anak atau cabang dari kepemilikan maupun dikendalikan, secara langsung maupun tidak oleh usaha yang lain dengan kriteria sesuai Undang-Undang. Usaha dalam kategori menengah sama halnya dengan usaha kecil namun ruang lingkup yang dijangkau dalam kategori menengah. Selanjutnya yang terakhir yaitu Usaha besar adalah usaha ekonomi aktif yang dijalankan oleh badan dengan total kekayaan dari penjualan bersih lebih besar dibandingkan usaha menengah. Usaha ini mencakup perusahaan swasta, patungan maupun milik negara, serta perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kriteria berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yaitu:

a. Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak sampai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan dalam satu tahun sebanyak Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

b. Usaha kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan dalam satu tahun sebanyak Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

c. Usaha Menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan dalam satu tahun sebanyak Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri serta dapat digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM dideskripsikan sebagai asumsi dasar salah satu konsep entitas serta hal tersebut untuk dapat digunakan menyusun laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM, suatu entitas harus bisa memisahkan kekayaan hasil usaha dengan kekayaan pribadi. SAK EMKM pada awalnya disahkan pada 24 Oktober 2016 oleh DSAK IAI serta mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2018 (IAI, 2024).

SAK EMKM merupakan sebuah standar dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh EMKM dalam menyusun laporan keuangan. Para entitas dalam pelaksanaan usahanya memiliki prinsip *going concern* yaitu menginginkan usaha yang dimiliki agar terus dapat berkembang. Adanya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dapat membantu para pemilik usaha dalam menentukan kebijakan yang akan datang serta kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Penyusunan SAK EMKM disusun cukup sederhana sehingga para pengguna usaha yang tergolong kecil serta menengah tidak akan menyulitkan dalam penerapannya (Pebdayanti & Ningsih, 2024).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) merupakan sebuah standar yang telah dibuat secara sederhana karena pengakuan biaya diukur menggunakan biaya historis serta mengatur transaksi umum yang dilakukan. Sehingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya cukup mencatat aset serta liabilitasnya sesuai dengan biaya perolehan. SAK EMKM dalam penyajiannya lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP (IAI, 2016). Dasar akrual digunakan oleh entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut dasar akrual pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan serta biaya saat memenuhi deskripsi dari masing-masing pos tersebut (Zulkarnain, 2022).

Berdasarkan IAI (2024) SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah. Entitas Menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM jika entitas memenuhi kriteria penerapan sebagai berikut: (1) tidak memiliki akuntabilitas publik; (2) memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM pada selama periode pelaporan; (3) tidak memilih untuk menggunakan SAK Indonesia untuk EP/SAK Indonesia untuk ETAP sebagai dasar pelaporan keuangannya. Entitas yang memenuhi kriteria tersebut, menerapkan persyaratan akuntansi dalam SAK EMKM untuk periode pelaporan sejak saat entitas tersebut memilih untuk menerapkan SAK EMKM.

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tujuan adanya SAK EMKM disusun untuk mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kerangka pelaporan keuangan SAK EMKM diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan perpindahan dari pelaporan keuangan yang berdasarkan kas ke

pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Selain itu, adanya SAK EMKM diharapkan menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia. Adanya SAK EMKM diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan panduan akuntansi ataupun pedoman UMKM yang bergerak pada berbagai jenis bidang usaha (IAI, 2024).

3. Laporan Keuangan

Berdasarkan penjelasan dari Syam and Latifah (2022), Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai kondisi finansial, kinerja, dan perubahan finansial suatu perusahaan, yang berguna bagi berbagai pihak dalam membuat pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan keuangan memiliki karakteristik relevansi dan penyajian yang jujur. Informasi yang diberikan dinilai sesuai jika mampu memengaruhi evaluasi kejadian masa lalu dari adanya keputusan ekonomi. Sementara itu, penyajian yang jujur mencerminkan fenomena ekonomi yang terjadi secara akurat dalam laporan keuangan.

Laporan finansial yang sesuai dengan peraturan akuntansi memiliki tujuan yaitu: (a) memberikan informasi yang berguna bagi semua pemilik untuk proses pengambilan wewenang; (b) penyusunan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan terkait informasi dampak finansial masa sebelumnya, namun tidak mencakup informasi non-keuangan; (c) laporan finansial memberikan informasi mengenai manajemen dalam pertanggungjawaban atas manajemen sumber daya yang telah dipercayakan. Laporan finansial mempresentasikan perolehan sebenarnya kinerja keuangan, kedudukan finansial, perubahan modal, dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK (Syam & Latifah, 2022).

Menurut IAI (2024) dalam penyusunan asumsi dasar laporan keuangan untuk UMKM menggunakan dasar akrual. Dasar akrual digunakan karena konsisten dengan kerangka konseptual laporan keuangan. serta konsisten dengan asumsi dasar yang digunakan oleh SAK lainnya. Laporan keuangan tidak disusun dengan dasar lain, misalnya dasar kas ataupun kas modifikasi karena akan menghasilkan kondisi yang tidak relevan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan laporan keuangan yang akan menyajikan informasi sesuai dengan representasi serta kondisi bisnis selama periode pelaporan. DSAK IAI memahami keterbatasan kapabilitas serta sumber daya UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, entitas yang memiliki jenis usaha yang tidak kompleks dengan transaksi secara kas maka adanya perbedaan kas basis dan akrual basis mungkin saja menjadi tidak material.

Berdasarkan SAK EMKM komponen yang berada dalam laporan keuangan minimum terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Adanya laporan posisi keuangan memberikan gambaran perusahaan tentang sumber daya yang dimiliki serta pengelolaan untuk masa kini maupun masa depan. Laporan posisi keuangan membantu pemilik usaha dalam menilai serta menjaga kestabilan bisnis yang dimiliki. Laporan posisi keuangan mencakup pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Persediaan;
- 3) Aset tetap;

- 4) Utang usaha;
- 5) Utang bank;
- 6) Ekuitas.

b. Laporan Laba Rugi

Pada laporan laba rugi menyediakan kinerja keuangan entitas. Pada laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan serta beban yang diakui selama periode. SAK EMKM mengatur tentang perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode-periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Laporan laba rugi dapat mencakup pos-pos berikut:

- 1) Pendapatan;
- 2) Beban keuangan;
- 3) Beban pajak;

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan prinsip yang mendasari informasi yang disajikan. Jenis informasi tambahan serta rincian yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan bergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos yang disebutkan dalam laporan keuangan merujuk-silang pada informasi terkait. Catatan atas laporan keuangan memuat:

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- 3) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan

4. Siklus Akuntansi

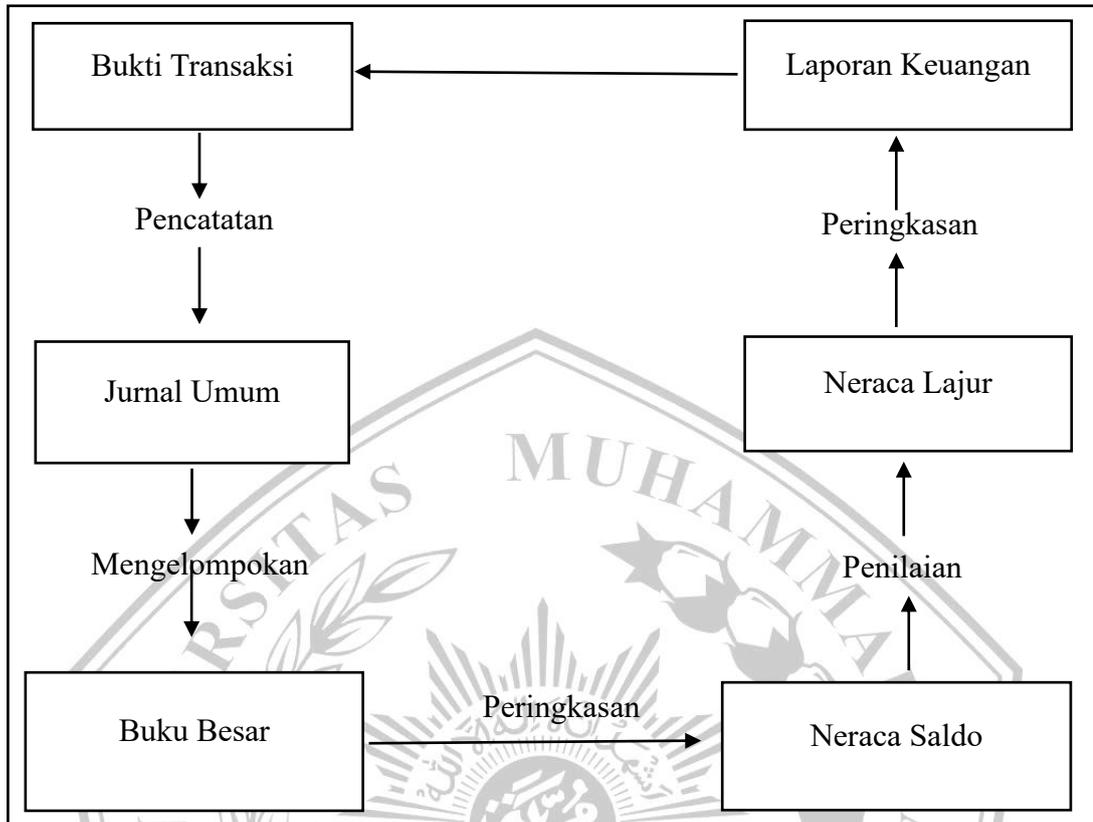
Siklus akuntansi merupakan keseluruhan tahapan akuntansi mulai dari pembuatan jurnal umum, posting ke buku besar, hingga pembuatan laporan keuangan (S, 2016). Berdasarkan I. A. Indonesia (2024) dijelaskan juga bahwa siklus akuntansi merupakan kegiatan yang dilakukan saat aktivitas akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang saling berartikulasi. Proses tersebut dilakukan terus menerus secara berulang kembali sehingga menjadi siklus yang saling berkesinambungan. Sehingga siklus akuntansi dapat dikatakan sebagai rangkaian tahapan sistematis yang dilalui dalam proses pengakuan, pengukuran, pelaporan serta pengungkapan data keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta dapat diandalkan. Siklus akuntansi terbagi menjadi tahap yaitu: (a) analisis bukti transaksi; (b) pencatatan jurnal; (c) pengelompokan buku besar; (d) ringkasan neraca saldo; (e) neraca lajur, serta; (f) laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan SAK EMKM disebutkan bahwa terdapat tiga komponen minimum dalam menyusun laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi

serta catatan atas laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah dalam laporan keuangan. Untuk laporan laba rugi menyajikan pendapatan, beban serta pajak penghasilan secara terpisah. Sedangkan catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tambahan dan rincian bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan entitas (IAI, 2024).

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah dengan biaya historis. Biaya historis aset adalah biaya sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis liabilitas merupakan biaya kas ataupun setara kas yang diterima maupun dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam usaha. Pengakuan pada laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu: (1) aset diakui ketika manfaat ekonomisnya berguna bagi entitas; (2) liabilitas diakui jika pengeluaran sumber daya mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban; (3) penghasilan diakui dalam laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomis yang berkaitan dengan aset dan penurunan liabilitas; (5) beban diakui diakui dengan penurunan manfaat ekonomis aset atau kenaikan liabilitas (IAI, 2024).

Proses Siklus Akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Proses Siklus Akuntansi

